

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017 lalu, ia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang kontroversial. Salah satu kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Presiden yang membawa slogan “*Make America Great Again*” itu adalah kebijakan untuk melakukan perang dagang dengan China. Perang dagang diartikan sebagai konflik ekonomi antar negara tentang tarif perdagangan yang dikenakan satu sama lain. Konflik ini biasanya muncul karena negara-negara yang terlibat berusaha meningkatkan impor atau eksportnya. Perang dagang berpotensi meningkatkan biaya impor tertentu jika negara-negara yang terlibat menolak untuk berkompromi.<sup>1</sup> Suatu negara yang meningkatkan tarif atas barang impor negara lainnya kemudian negara yang terkena tarif tinggi tersebut membalas menggunakan aksi yang serupa sehingga peristiwa saling membalas ini berjalan secara terus menerus disebut perang dagang.

Pada 22 Januari 2018, Donald Trump untuk pertama kalinya menjatuhkan tarif impor pada barang-barang China. Tarif dikenakan pada produk panel surya sebesar 30% dan mesin cuci tertentu sebesar 20%. Dua bulan kemudian, Trump merilis laporan *US Trade Representative (USTR)* yang berisi sanksi perdagangan

---

<sup>1</sup> Nita Anggraeni, *Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, dalam Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15 No. 1, 2019, hal. 3.

kepada China berupa pemberian tarif impor terhadap lebih dari 1.300 jenis komoditas yang berasal dari China sebesar US\$60 miliar. Hal ini membuat China sangat terpukul sebab aktivitas ekspor-impor merupakan sumber pemasukan terbesarnya. Pada 23 Maret 2018 China mengambil aksi balasan dengan mengenakan tarif atas produk impor dari Amerika Serikat senilai US\$3 miliar.<sup>2</sup> China meningkatkan tarif untuk beberapa produk impor AS, antara lain daging babi, skrap aluminium hingga 25%, dan 15% untuk 120 komoditas AS lainnya termasuk almond dan apel. Tak tinggal diam, Amerika Serikat kembali membalas perbuatan China dengan mengeluarkan larangan membeli komponen AS bagi perusahaan telekomunikasi China selama 7 tahun.

Pertemuan antara Amerika Serikat dan China kemudian digelar guna meleraikan perselisihan yang ada pada Mei 2018 di Beijing. China telah berusaha memberikan solusi atas perang dagang yang terjadi dengan menawarkan paket yang dapat diaplikasikan guna memperbaiki defisit perdagangan AS, penurunan tarif impor yang tadinya 25% menjadi 15%, serta rencana peningkatan impor dari AS. Sayangnya, Presiden Trump tak puas akan tawaran China dan meneruskan perang dagang dengan bahkan menambah tarif masuk 25% terhadap impor China sejumlah US\$ 50 miliar dan beberapa kebijakan lainnya. Tentu saja hal ini mengundang reaksi negatif dari China. Beberapa pertemuan lanjutan juga terus diselenggarakan namun Amerika Serikat dan China tetap tidak kunjung menemui

---

<sup>2</sup> Andrea Durkin dan Lauren Kyger, "U.S.-CHINA TRADE WAR TIMELINE", 15 Januari 2020, diakses dari hinrichfoundation: <https://tradevistas.org/u-s-china-tradewar-timeline/> pada 2 Maret 2021.

jalan keluar untuk masalah mereka.<sup>3</sup> Pada bulan September 2020, *World Trade Organization* (WTO) telah memutuskan bahwa administrasi Presiden Donald Trump adalah pihak yang bersalah atas pemberlakuan tarif miliaran dolar dalam perang dagangnya ke China.<sup>4</sup>

Perang dagang AS-China ini menjadi peristiwa yang penting bagi dunia internasional karena memiliki dampak yang cukup signifikan pada perekonomian dunia secara global. Amerika Serikat dan China merupakan dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia sehingga pasti akan ada pengaruh yang ditimbulkan dari perselisihan keduanya, terutama bagi negara-negara mitra dagang AS dan China. Pergerakan indeks global juga menjadi lebih fluktuatif setelah terjadinya perang dagang yang mengisyaratkan perang dagang AS-China telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global dan menurunkannya optimisme investor pada perekonomian di masa depan.<sup>5</sup> Dampak perang dagang AS-China juga terasa di kawasan ASEAN. Negara-negara di kawasan ASEAN memiliki hubungan ekspor dan impor yang dominan dengan Amerika Serikat dan China. Produk ekspor dari Amerika Serikat dan China ke negara-negara di kawasan ASEAN menyumbang 20% dari total barang yang masuk ke negara-negara ASEAN. Apabila perang dagang kedua negara terus berlanjut, negara-negara di

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia, “*Kronologi Perang Dagang AS-China Selama Kepemimpinan Trump*”, 4 November 2020, diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103154223-92-565387/kronologi-perang-dagang-as-china-selama-kepemimpinan-trump> pada 2 Maret 2021.

<sup>4</sup> Rehia Sebayang, “*Xi Jinping Kalahkan Trump, Ini Sejarah Perang Dagang China-AS*”, 16 September 2020, diakses dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200916124053-4-187231/xi-jinping-kalahkan-trump-ini-sejarah-perang-dagang-china-as/2> pada 2 Maret 2021.

<sup>5</sup> Didik Gunawan & Yenni Arfah, *Dampak Perang Dagang Amerika-Tiongkok Terhadap Integrasi Pasar Modal Global*, dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan, Vol. 1 No. 1, 2019, hal 77.

kawasan ASEAN diprediksi akan mengalami *collateral damage* sebagai akibat dari produksi barang ekspor yang stagnan yang akan mengakibatkan kosongnya suplai dan tingginya permintaan produk di kawasan ASEAN.<sup>6</sup>

Dampak paling terlihat dari perang dagang juga justru datang dari kedua negara yang melakukannya. Bahkan sebelum perang dagang memuncak, ada prediksi yang menyebutkan bahwa jika ekspor dari China ke AS dikurangi setengahnya karena tarif impor yang tinggi, maka kerugian langsung dari PDB China setidaknya akan mencapai 0,43%. Dari sisi Amerika Serikat, perusahaan AS di China memiliki kemungkinan untuk kehilangan konsumen mereka sebab seruan nasionalistis China untuk memboikot produk perusahaan Amerika Serikat termasuk Apple, McDonald's, KFC.<sup>7</sup> Perang dagang Amerika Serikat-China ini telah melemahkan ekonomi Amerika Serikat dan menjadi *boomerang* bagi Amerika Serikat sendiri.

Perang dagang ini merupakan salah satu dari gambaran dari politik luar negeri Donald Trump. Dengan slogan "*America First*" yang dibawanya, Trump sangat mengutamakan kepentingan Amerika Serikat dan membuat proteksi ekonomi sehingga muncul anggapan bahwa kepemimpinan Trump mengarah pada wacana deglobalisasi, hal ini berlawanan dengan kepemimpinan terdahulu dibawah Barack Obama. Sebelumnya, politik luar negeri AS pada saat Obama menjabat jadi presiden sangat terbuka pada globalisasi, ditunjukkan dengan

---

<sup>6</sup> Febrina Damayanti, dkk, *ASEAN di Tengah Rivalitas AS dan Cina: Kerja sama ASEAN dengan RCEP dalam Mengurangi Dampak Perang Dagang*, dalam Jurnal Indonesian Perspective, Vol. 3 No. 2, 2019, hal 145-158.

<sup>7</sup> Larisa Kapustina, dkk, *US-China Trade War: Causes and Outcomes*, dalam Jurnal SHS Web of Conferences, Vol. 73 No. 1, 2020, hal. 1-12.

kebijakan *pivot to Asia* agar tidak melewatkan perkembangan ekonomi hebat yang terjadi khususnya di Asia Timur. AS dibawah kepemimpinan Obama juga ikut menyepakati kerjasama TPP (Trans Pacific Partnership) yang sangat mendorong perdagangan multilateral. Oleh Trump, kebijakan tersebut direvisi, Trump jauh lebih menyukai perdagangan bilateral. Pada hari pertama resmi menjadi Presiden AS, Trump sudah menarik AS dari kemitraan TPP tersebut. Menurutnya, kerjasama multilateral malah merugikan kepentingan ekonomi AS serta bertentangan dengan semangat “America First”. Pada hari berikutnya Trump juga secara terang-terangan mengungkapkan niatnya untuk merenegosiasi North America Free Trade Area (NAFTA) dengan tujuan membangkitkan dan memperkuat industri dalam negeri Amerika.<sup>8</sup>

Tidak hanya pada isu ekonomi, kebijakan AS yang lebih tertutup juga terlihat di isu-isu lainnya. Pada isu keamanan wilayah, Trump membangun tembok pembatas antara AS dan Meksiko demi menghalau imigran ilegal asal Meksiko memasuki AS dan menyebabkan masalah keamanan nasional. Para imigran juga meningkat daya saing bagi pekerja AS, Trump merasa perlu untuk melindungi masyarakat AS.<sup>9</sup> Kemudian untuk isu perubahan iklim, Trump dan Obama juga sangat bertolak belakang. Pada era Obama kesepakatan tentang isu lingkungan menjadi krusial untuk memperlihatkan posisi AS di panggung internasional. Bahkan, AS dibawah Obama juga menjadi pelopor terumuskannya

---

<sup>8</sup> Helsa Eka Putri & Aspin Nur Arifin Rivai, *Donald Trump, America First, dan Deglobalisasi: Bagaimana Kelanjutannya?*, dalam *Insignia: Journal of International Relations*, Vol. 6 No. 1, 2019, hal. 30.

<sup>9</sup> P. M. Orrenius & M. Zavodny, *Creting Cohesive, Coherent Immigration Policy*, dalam *Journal on Migration and Human Security*, Vol. 5, 2017, hal. 180-193.

Paris Agreement. Trump menganggap hal ini tidak begitu penting dan bisa memperlambat kemajuan ekonomi AS sehingga ia menandatangani keluarnya AS dari Environmental Protection Agencies (EPA) dan the Clean Power Plan (CPP) serta Paris Agreement. Perbedaan lainnya antara politik luar negeri Trump dan presiden AS yang lebih dulu juga dapat diamati dari kebijakan Trump dalam sektor imigrasi dimana Trump membuat larangan bagi penduduk beberapa negara Muslim memasuki AS dalam rangka melindungi AS dari serangan terorisme. Negara-negara yang termasuk yaitu Irak, Iran, Yaman, Suriah, Somalia, Sudan, dan Libia. Dalam pandangan Trump, penduduk negara-negara tersebut berpotensi melakukan teror di Amerika. Hal ini berbeda dengan pemerintahan di bawah Obama maupun Bush yang cenderung lebih banyak melakukan kerjasama militer guna melawan terorisme (*War on Terror*) daripada secara langsung dengan melarang imigran dari negara Muslim. Secara umum, politik luar negeri Amerika Serikat dibawah Donald Trump dipenuhi dengan kebijakan-kebijakan yang berfokus ke dalam negeri (*inward looking foreign policy*), yang membuat Amerika Serikat keluar dari tatanan global maupun regional.<sup>10</sup>

Dalam pidatonya di bulan Februari 2017, Donald Trump menyebutkan bahwa banyak negara telah diuntungkan dari tarif impor yang relatif rendah yang diberlakukan oleh otoritas Amerika Serikat sehingga mereka dapat menjual komoditas mereka sebanyak mungkin sementara mereka sendiri memberlakukan pajak yang tinggi untuk ekspor Amerika Serikat. Mengutip dari Trump: “...*The word "free" is very deceiving because it's good for them, it's not good for us. I*

---

<sup>10</sup> Siswanto, *Kepemimpinan Donald Trump Dan Turbulensi Tatanan Dunia*, dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15 No. 1, 2018, hal. 49

want fair trade. And if we're going to be taxed, they should be taxed at the same amount, the other countries.”<sup>11</sup> Dari pidato ini Trump mengisyaratkan perasaan tidak sukanya pada perdagangan yang menurutnya tidak adil dan membicarakan bagaimana Amerika Serikat harus mengatur tarif untuk produk-produk luar negeri demi menghindari kerugian yang disebabkan oleh pengaturan tarif yang belum sempurna. Ini pula yang kelak menjadi cikal bakal perang dagang Amerika Serikat dan China.

Donald Trump merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam pengambilan kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan perang dagang dengan China. Kebijakan yang diambil Trump adalah kebijakan yang cukup berani. Pasalnya, perang dagang merupakan wujud proteksionisme Amerika Serikat. Sejak masa kampanye, Trump memang sudah condong ke arah proteksionisme. Hal ini berbanding terbalik dengan situasi ekonomi internasional yang dewasa ini semakin gencar melakukan perdagangan bebas (*free trade*) dan kerjasama ekonomi baik itu bilateral maupun multilateral. Proteksionisme dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang secara sengaja dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian proses impor atau ekspor dengan cara menciptakan berbagai hambatan perdagangan guna melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan industri luar negeri.<sup>12</sup> Hambatan perdagangan bisa berupa kenaikan bea masuk barang ke suatu negara, larangan mengimpor barang tertentu,

---

<sup>11</sup> Ian Schwartz, “*Trump: I Am A Nationalist in A True Sense*”, 27 Februari 2017, diakses dari Real Clear Politics: [https://www.realclearpolitics.com/video/2017/02/27/trump\\_i\\_am\\_a\\_nationalist\\_in\\_a\\_true\\_sense.html](https://www.realclearpolitics.com/video/2017/02/27/trump_i_am_a_nationalist_in_a_true_sense.html) pada 3 Maret 2021.

<sup>12</sup> Sumadji P., Rosita, dan Yudha Pratama, *Kamus Ekonomi*. (Jakarta: Wacana Intelektual, 2006)

membuat standarisasi dan sertifikasi barang masuk yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Dalam kasus perang dagang dengan China, Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump memilih untuk menaikkan tarif bagi produk-produk impor dari China. Melalui kebijakan ini Donald Trump berusaha untuk memenuhi janji-janjinya proteksionismenya saat kampanye dan berusaha agar industri dalam negeri Amerika Serikat tidak terancam oleh keberadaan China.

Kebijakan luar negeri dirumuskan secara kompleks oleh berbagai sumber, termasuk sumber individu pembuat kebijakan luar negeri. Terdapat kaitan yang kuat antara faktor kepribadian individu pembuat kebijakan luar negeri dan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Faktor psikologis, ideasional, dan budaya dari individu dapat mempengaruhi pembuat keputusan kebijakan luar negeri. Begitu juga dengan bagaimana individu itu memahami niat dan kemampuan mereka sendiri dan orang lain.<sup>13</sup> Karakter Donald Trump menjadi menarik sebagai bahan penelitian sebab dapat membantu memahami mengapa AS mengambil kebijakan untuk melakukan perang dagang dengan China. Karakter personal pemimpin politik juga dapat menjadi alat untuk menjelaskan mengapa pemimpin yang satu dengan yang lain memiliki arah kebijakan luar negeri yang berbeda-beda dan mengapa mereka mungkin mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan kondisi yang sama, ini karena mereka memiliki interpretasi masing-masing atas ancaman luar negeri. Kebijakan-kebijakan luar negeri Donald Trump memang sangat berbeda dari presiden AS yang terdahulu, Barack Obama. Amerika Serikat dibawah pemerintahan Obama fokus meningkatkan pengaruh AS

---

<sup>13</sup> Muhammad Nadeem Mirza, *The Role of Leadership and Idiosyncrasy in US Foreign Policy towards Pakistan*, dalam *Journal of Contemporary Studies*, Vol. 7 No. 2, 2018, hal. 33-52.



melalui peran aktif dalam organisasi internasional dan menjalin banyak kerjasama perdagangan. Sementara itu dibawah kepemimpinan Trump AS fokus pada masalah dalam negeri dan lebih proteksionis. Selain itu, Profesor Joseph Nye juga menyatakan bahwa kepribadian Donald Trump tidak bisa dilepaskan dari perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Nye berargumen bahwa gaya kepemimpinan Trump telah memberi efek pada merenggangnya hubungan AS dengan sekutu, melemahnya institusi-institusi AS dan menurunnya soft power Amerika Serikat.<sup>14</sup> Gaya kepemimpinan Donald Trump yang unik membuat penulis terdorong dan tertarik untuk meneliti mengapa Donald Trump sebagai kepala negara AS mengambil kebijakan untuk melakukan perang dagang dengan China ditinjau dari karakter pribadinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Donald Trump mengambil kebijakan agar AS melakukan perang dagang dengan China?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menelaah penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang relevan dengan skripsi yang sedang ditulis penulis. Penting bagi penulis untuk melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian dan tulisan-tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan Analisis Karakter Donald

---

<sup>14</sup> Joseph S. Nye, Jr., “*Trump’s Effect on US Foreign Policy*”, 4 September 2019, diakses dari Project Syndicate: <https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-long-term-effect-on-american-foreign-policy-by-joseph-s-nye-2019-09> pada 23 Desember 2021.

Trump dan Perang Dagang Amerika Serikat-China guna mempertegas atau melengkapi celah-celah yang kurang pada penelitian.

Tinjauan pertama berasal dari tesis yang ditulis oleh Herlina Widya dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ditinjau dari Profil Psikologi Politik Presiden Donald Trump” (2019).<sup>15</sup> Tesis ini memakai metode *Political Psychological Profiling* untuk melihat lebih dalam kepribadian Donald Trump dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dijelaskan bahwa Trump adalah sosok yang tidak pernah jauh dari kontroversi sejak masa kampanye sampai terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Sejalan dengan kepribadiannya yang impulsif, Trump terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menarik perhatian dunia seperti keluar dari kemitraan TPP, meniadakan Obamacare, membangun tembok perbatasan Meksiko, serta memulai perang dagang (*trade war*) dengan China. Hasil penelitian tesis ini mengangkat fakta bahwa Donald Trump setidaknya mempunyai tujuh faktor kepribadian kuat yang mempengaruhi perilaku politik dan caranya mengambil keputusan. Tujuh faktor tersebut termasuk optimisme, agresivisme, ketegasan, kejujuran, jiwa bisnis, dan keinginan untuk diakui.

Tinjauan kedua yang dipakai penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Lea Florencia Kurnia dalam bentuk skripsi yang berjudul “Faktor Idiosinkratik dalam Kebijakan Luar Negeri Donald Trump terhadap Program

---

<sup>15</sup> Herlina Widya, Tesis: “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ditinjau dari Profil Psikologi Politik Presiden Donald Trump” (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2019)

Nuklir Iran” (2019).<sup>16</sup> Skripsi ini menghasilkan temuan bahwa faktor idiosinkratik Trump berperan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk keluar dari Perjanjian JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*). Faktor idiosinkratik Trump didapat dari latar belakangnya sebagai pengusaha yang kemudian memberikan pengaruh pada cara pandang serta pola pikirnya sebagai seorang presiden. Selain itu, Donald Trump memutuskan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Perjanjian JCPOA karena ia memiliki keyakinan akan kemunduran kejayaan Amerika Serikat sehingga Trump ingin mengoptimalkan keuntungan dan kepentingan Amerika Serikat saja, ditambah dengan rendahnya sensitivitas Trump terhadap lingkungannya. Motif yang mendorong Trump untuk mengambil kebijakan keluar dari Perjanjian JCPOA adalah *need for approval* atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Trump ingin menunjukkan lagi posisi Amerika Serikat sebagai negara *superpower*.

Tinjauan ketiga adalah skripsi dengan judul “Analisa Karakteristik Kepribadian Donald John Trump dalam Kebijakan Keluarnya Amerika Serikat dari Keanggotaan *Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA)*” yang ditulis oleh Putri Nabilla (2019).<sup>17</sup> Dalam skripsinya tersebut, Putri bertujuan mengetahui alasan Donald Trump sebagai pemimpin negara mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan TPPA dengan menggunakan Teori Tipologi Kepribadian yang dikemukakan oleh Margaret G. Hermann. Teori ini berbicara tentang

---

<sup>16</sup> Lea Florencia Kurnia, Skripsi: “*Faktor Idiosinkratik dalam Kebijakan Luar Negeri Donald Trump terhadap Program Nuklir Iran*” (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2019)

<sup>17</sup> Putri Nabilla, Skripsi: “*Analisa Karakteristik Kepribadian Donald John Trump dalam Kebijakan Keluarnya Amerika Serikat dari Keanggotaan Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA)*” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

bagaimana proses pembuatan politik luar negeri suatu negara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh yang diberikan oleh pemimpin negara itu sendiri. Meskipun terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kebijakan keluarnya Amerika Serikat dari TPPA, tetapi individu pengambil keputusan yaitu Donald Trump dan karakteristik yang melekat padanya memiliki andil yang besar dalam pembuatan keputusan. Skripsi ini menjelaskan bahwa kebijakan keluarnya Amerika Serikat dari TPPA diputuskan oleh Donald Trump lewat nota kepresidenan yang bahkan tidak melibatkan persetujuan Kongres. Kebijakan ini menjadi kontroversial sebab Amerika Serikat merupakan salah satu negara pemrakarsa pembentukan TPPA. Hasil penelitian mengemukakan alasan Donald Trump membuat kebijakan ini berhubungan dengan kepribadiannya yang memiliki nasionalisme yang tinggi, kepercayaan yang tinggi pada kemampuan diri sendiri untuk mengontrol sebuah peristiwa, dan ketidakpercayaan pada orang lain.

Tinjauan keempat berasal dari artikel yang berjudul “Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Keluar dari Paris Agreement (COP-21)”. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau Vol. 5 Edisi II.<sup>18</sup> Dijelaskan dalam artikel bahwa Paris Agreement merupakan kesepakatan global untuk memperkuat respons terhadap perubahan iklim, namun Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut. Kasus ini dianalisa dengan konsep faktor idiosinkratik yang diambil berdasarkan model James N. Rosenau dan Alex Mintz. Sumber idiosinkratik

---

<sup>18</sup> Beryl Rifqi Alhadi, *Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Keluar dari Paris Agreement (COP-21)* dalam Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau Vol. 5 Edisi II, 2018, hal 1-15.

melihat dari *value*, *experience*, *talent*, dan *personality* dari pembuat kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Trump keluar dari Paris Agreement karena tiga faktor. Faktor yang pertama datang dari individu Donald Trump sendiri yang tidak percaya akan perubahan iklim. Seringkali pada saat kampanye Trump mengeluarkan pernyataan yang menolak konsep *global warming*. Faktor kedua adalah adanya kepentingan perusahaan minyak, gas, dan batu bara Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan ini sudah mendanai Partai Republik. Faktor yang terakhir adalah pengaruh Partai Republik yang sama halnya dengan Trump, skeptik terhadap pemanasan global.

Berdasarkan empat tulisan sebelumnya yang ditinjau penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Donald Trump merupakan objek yang menarik diteliti karena kerap kali mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Kebijakan-kebijakan itu diputuskan oleh Donald Trump dipengaruhi oleh karakteristik personalnya yang kuat. Pada penelitian ini penulis akan menelaah karakter Donald Trump dalam kasus perang dagang Amerika Serikat-China.

#### **D. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian, karena teori berperan sebagaimana pisau bedah untuk menganalisa fenomena yang terjadi. Pemilihan teori yang tepat dapat menjelaskan suatu fenomena. Menurut Mas'ood, teori merupakan kumpulan konsep-konsep yang dihubungkan sesuai dengan aturan logika sehingga terbentuk pernyataan tertentu yang mampu

menjelaskan juga memberi makna pada fenomena secara ilmiah. Selain berfungsi sebagai sarana eksplanasi, teori juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai dasar prediksi fenomena dimasa depan.<sup>19</sup> Sebelum membahas mengenai teori yang dipakai, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan konsep yang relevan dengan fenomena yang diamati dalam penelitian ini. Adapun konsep yang penulis gunakan adalah konsep kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang dimaksud disini adalah kebijakan Donald Trump untuk melakukan perang dagang dengan China.

Plano dan Olton mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai strategi atau sebuah tindakan terencana yang dirumuskan oleh pembuat keputusan negara untuk menghadapi negara lain maupun unit politik internasional lainnya. Kebijakan luar negeri bisa berbentuk inisiatif ataupun reaksi atas inisiatif yang telah dilakukan negara lain. Kegunaan dari kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang tertuang dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>20</sup> Konsep *Foreign policy* atau kebijakan luar negeri adalah langkah yang hendaknya diambil dengan hati-hati, karena mencakup tindakan-tindakan yang dengannya pemerintah nasional akan melakukan hubungan internasional, bisa itu dengan negara lain, organisasi internasional, atau aktor-aktor non pemerintah yang tidak bisa mereka kontrol sepenuhnya sebab berada di luar kedaulatan negara mereka. Pada umumnya, pembuat kunci dari kebijakan luar negeri adalah para pejabat pemerintah dengan posisi penting, seperti presiden, perdana menteri, serta

---

<sup>19</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994) hal. 185

<sup>20</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*. (Bandung: Abardin, 1999) hal. 5

menteri-menterinya.<sup>21</sup> Secara umum, kebijakan luar negeri adalah seperangkat formula nilai, arahan, sikap, dan komitmen yang dikembangkan oleh pembuat keputusan untuk mengamankan serta memajukan kepentingan nasionalnya dalam dunia internasional. Kebijakan luar negeri setiap negara tentu tidak sama antara satu dengan yang lain karena bergantung pada tujuan masing-masing negara.

Mengacu pada James N. Rosenau, kajian kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem merupakan kajian yang luas dan kompleks dimana terdapat rangsangan dari lingkungan eksternal dan ada pula rangsangan domestik yang menjadi input. Input yang berasal dari luar dan dalam ini kemudian memengaruhi kebijakan luar negeri negara, diproses oleh para pembuat keputusan dan dikonversi menjadi output. Proses konversi yang berlangsung dalam perumusan kebijakan luar negeri mempertimbangkan tujuan dan kapabilitas negara.<sup>22</sup> Rosenau membagi input kebijakan luar negeri ke dalam empat sumber utama yaitu sumber sistemik (*systemic sources*), sumber masyarakat (*societal sources*), sumber pemerintahan (*governmental sources*), dan sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*).<sup>23</sup>

Oleh Eugene Wittkopf, Christopher Jones, dan Charles Kegley, Jr, kerangka pemikiran Rosenau diadopsi untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat dirumuskan dan mengapa Amerika Serikat bertindak sedemikian rupa di politik internasional. Sumber-sumber kebijakan luar negeri

---

<sup>21</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hal. 439

<sup>22</sup> James N. Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy* (New York: The Free Press, 1980) hal. 171

<sup>23</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, dan Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press, 1976) hal. 15

Amerika Serikat disuguhkan dalam model teoretis yang disebut *Funnel of Causality*.<sup>24</sup>

Model ini berbentuk menyerupai corong dan menempatkan lima sumber kebijakan luar negeri Amerika Serikat berikut ini dari atas ke bawah: lingkungan global (*external sources*), lingkungan sosial bangsa (*societal sources*), pengaturan pemerintahan dimana pembuatan kebijakan terjadi (*governmental sources*), peran yang ditempati oleh pembuat kebijakan (*role sources*), dan karakteristik individu dari para elit pembuat kebijakan luar negeri (*individual sources*). Kelima sumber ini secara kolektif membentuk perilaku Amerika Serikat dalam hubungan luar negeri (*output*). Dalam model ini, perilaku kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah variabel dependen sedangkan sumber-sumber kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi variabel independennya. Proses pembuatan kebijakan luar negeri dianggap sebagai variabel intervening yang menghubungkan *input* kebijakan luar negeri (variabel independen) menjadi *output* (variabel dependen).<sup>25</sup>

Penulis memposisikan penelitian ini pada tingkat analisa individu, sehingga penelitian akan berfokus pada sumber kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang kelima yaitu sumber individu. Donald Trump sebagai individu merupakan aktor dominan pembuat kebijakan perang dagang dengan China. Sumber individu, nama lainnya sumber idiosinkratik, mencakup keterampilan, kepribadian, keyakinan, kecenderungan psikologis, nilai-nilai, dan pengalaman sebelumnya dari individu yang mempengaruhi persepsi dan perilaku mereka

---

<sup>24</sup> Eugene Wittkopf, Christopher Jones, dan Charles Kegley, Jr., *American Foreign Policy: Pattern and Process* (USA: Thomson Wadsworth, 2008) hal. 18

<sup>25</sup> Ibid, hal. 19.



terhadap kebijakan luar negeri. Setiap individu pembuat kebijakan tentunya memiliki kepribadian dan nilai-nilai yang berbeda sehingga membedakan pula kebijakan luar negeri yang putuskannya. Kognisi dan tanggapan para pembuat keputusan tidak ditentukan oleh fakta-fakta objektif dari sebuah situasi, tetapi ditentukan oleh *image* dan persepsi mereka atas situasi tersebut. Kepribadian pembuat kebijakan, pandangan mereka atas dunia, dan gaya pengambilan keputusan mereka biasanya dapat ditelusuri dari sejarah hidup pembuat kebijakan, meliputi pengalaman masa kecil mereka, hubungan mereka dengan keluarga dan teman-teman mereka, dan cara mereka mengonsepan diri mereka sendiri.<sup>26</sup>

Cara lain untuk mengidentifikasi sumber idiosinkratik pembuat kebijakan luar negeri menurut Wittkopf adalah dengan menyelidiki perilaku dan preferensi mereka dalam ciri-ciri kepribadian tertentu. Wittkopf menyodorkan delapan konsep yang terkait dengan sikap, keyakinan, dan perilaku kebijakan luar negeri para elit politik luar negeri. Delapan konsep itu antara lain *nationalism, need for power, need for affiliation, need for achievements, distrust of others, conceptual complexity, historical analogies, dan operational codes*.<sup>27</sup> Konsep yang pertama adalah *nationalism*. Nationalisme adalah sebuah keadaan pikiran (*state of mind*) yang memberikan kesetiaan utama pada satu negara dan mengesampingkan objek-objek lainnya. Kaum nasionalis mengangungkan negara mereka sendiri dan

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 492-493.

<sup>27</sup> Ibid, hal. 505-507.

cenderung merendahkan negara lain karena mereka melibatkan egonya dengan negara mereka sendiri.<sup>28</sup>

Kebutuhan akan kekuatan (*need of power*) yaitu kebutuhan individu untuk memiliki pengaruh dan dapat mengontrol orang lain. Para pemimpin politik yang memiliki kebutuhan akan kekuatan yang tinggi pada umumnya juga memiliki sentiment nasionalis yang kuat dan cenderung terlibat dalam perilaku yang agresif. Tingkat kebutuhan akan kekuatan seorang presiden Amerika Serikat dapat digunakan untuk memprediksi sedikit banyaknya keikutsertaan Amerika Serikat dalam perang maupun konflik selama masa administrasi presiden itu. Kebutuhan akan afiliasi (*need for affiliation*) bersangkutan dengan seberapa peduli individu untuk memelihara hubungan persahabatan dengan orang lain. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri karena pembuat kebijakan yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi akan lebih suka terlibat dalam hubungan kerjasama dengan negara lain daripada membuat kebijakan yang bersifat ketat dan sulit.<sup>29</sup>

Kebutuhan akan pencapaian (*need for achievement*) adalah tingkat perhatian individu dalam mencapai keunggulan di semua aspek hidupnya. Dengan kebutuhan akan pencapaian yang tinggi, individu pembuat kebijakan luar negeri berkeinginan untuk membuat dampak yang besar dan mereka juga bersedia untuk mengambil resiko yang besar. Ketidakpercayaan pada orang lain (*distrust of others*) merupakan sebuah karakteristik kepribadian yang mencerminkan

---

<sup>28</sup> Ross Stagner, *Personality Dynamics and Social Conflict* dalam *Journal of Social Issues* Vol. 17, 2010, hal 28-44.

<sup>29</sup> David Winter dan Leslie Carlson, *Using Motive Scores in the Psychobiographical Study of an Individual: The Case of Richard Nixon* dalam *Journal of Personality* Vol. 56, 1988, hal. 75-103.

kecurigaan seseorang terhadap motivasi dan tindakan orang lain. Individu yang memiliki karakter ini akan sangat waspada terhadap orang lain. Pembuat kebijakan luar negeri dengan *distrust of others* yang tinggi cenderung skeptis terhadap potensi manfaat kerjasama internasional. Konsep ini masih berhubungan dengan konsep-konsep sebelumnya yaitu nasionalisme dan kebutuhan akan kekuatan.<sup>30</sup>

Kompleksitas konseptual (*conceptual complexity*) adalah tentang bagaimana individu menyusun pandangan mereka atas suatu hal. Individu yang memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi adalah mereka yang melihat banyak kemungkinan dan percaya bahwa reaksi mereka terhadap peristiwa bersifat fleksibel. Sebaliknya, individu pemimpin yang rendah kompleksitasnya merasa memiliki pilihan kebijakan yang relatif sedikit sehingga lebih mungkin bagi mereka mengambil kebijakan konfliktual.<sup>31</sup> Analogi sejarah (*historical analogies*) maksudnya para pemimpin politik seringkali menyusun pemahaman mereka tentang dunia dengan mengandalkan interpretasi mereka terhadap pelajaran-pelajaran di masa lalu. Mereka melihat situasi saat ini sebagai analogi peristiwa sebelumnya, menyamakannya, dan memakai pelajaran dari masa lalu sebagai panduan untuk menyelesaikannya. Mengetahui analogi mana yang dipakai individu dapat memberikan wawasan tentang perilakunya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Margaret G. Hermann, *Explaining Foreign Policy Behavior Using Personal Characteristics of Political Leaders* dalam *Jurnal International Studies Quarterly* Vol. 24, 1980, hal. 7-46.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976) hal. 217.

Konsep yang terakhir adalah kode operasional (*operational codes*). Kode operasional diartikan sebagai sebuah konstruksi yang mencakup beberapa karakteristik pribadi yang berkaitan dengan pandangan individu tentang faktor-faktor fundamental yang memberi efek pada beroperasinya dunia. Termasuk dalam kode operasional adalah keyakinan pembuat kebijakan tentang sifat dasar lingkungan politiknya. Individu bisa melihat dunia pada dasarnya kooperatif, namun bisa juga melihatnya memang bersifat konfliktual. Individu bisa percaya bahwa partisipasi dalam kerjasama internasional adalah cara yang efektif untuk mencapai tujuan, tetapi individu bisa juga tidak memercayainya. Delapan konsep di atas akan membantu penulis mengidentifikasi karakter Donald Trump dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk melakukan perang dagang dengan China.

Selain konsep-konsep di atas, penulis juga menggunakan Teori Peran (*role theory*). Mohtar Mas'ood dalam bukunya "*Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*" mendefinisikan peranan sebagai perilaku yang melekat pada posisi tertentu yang dibentuk oleh harapan (*expectation*). Dalam kata lain, peran tidak hanya ditentukan oleh konsepsi pemegang peran sendiri tentang perilaku yang sesuai, namun juga dibentuk oleh harapan aktor lain terhadap peranan tersebut karena perilaku pada dasarnya harus dipahami dalam konteks sosial. Seseorang yang menduduki suatu posisi diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut. Maka, teori peranan (*role theory*) menyatakan bahwa perilaku politik merupakan perilaku dalam menjalankan peranan politik dan teori ini memiliki asumsi bahwa kebanyakan dari perilaku politik adalah hasil dari

harapan yang diberikan terhadap peran yang diduduki oleh seorang aktor politik.<sup>33</sup> Kepribadian aktor politik tentu mempengaruhi kebijakan yang dibuatnya, namun kebijakan itu dibuat saat ia menjalankan sebuah atau serangkaian peranan. Fenomena politik tidak akan bisa dijelaskan dengan hanya melihat individu tanpa melihat konteks sosialnya. Perilaku pembuat keputusan luar negeri juga dibatasi oleh harapan dari lingkungannya.

Harapan (*expectation*) yang membentuk perilaku aktor politik bisa datang dari dua sumber. Sumber pertama adalah harapan yang berasal dari orang lain. Lingkungan luar atau masyarakat mempunyai harapan akan bagaimana aktor politik seharusnya bertindak. Lingkungan luar ini mempengaruhi apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh individu dalam hubungan internasional. Seringkali individu yang berada dalam suatu kelompok harus bertindak dengan mempertimbangkan komitmen dan kehendak kelompoknya serta harus patuh untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya. Namun tentu saja hal ini masih berkaitan dengan persepsi aktor politik sendiri atas harapan-harapan yang dibuat orang lain tentang perannya. Seseorang yang memegang peran sebagai presiden misalnya, ia akan menyadari bahwa masyarakat menganggap seorang presiden memiliki kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang harus dilaksanakan. Persepsinya akan harapan masyarakat itulah yang akan membentuk perilakunya dalam menjalankan peran sebagai presiden. Sumber harapan kedua datang dari penafsiran aktor politik/pemegang peran itu sendiri tentang perannya. Aktor politik memiliki pemikiran sendiri terkait apa yang harus dan tidak boleh ia

---

<sup>33</sup> Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi* (Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1989) hal. 44.

dilakukan. Seorang presiden tentu mempertimbangkan harapan orang lain terhadap dirinya, namun ia juga memiliki gagasan sendiri tentang peranan yang harus dimainkannya (penafsiran internal). Penafsiran yang dilakukan oleh individu atas perannya sendiri juga turut dipengaruhi oleh harapan orang luar, proses ini disebut proses belajar (*learning*). Sumber harapan kedua ini mencerminkan sikap, ideologi, dan kepribadian pemegang peran yang sudah berkembang sebelum ia menjalankan perannya.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian diatas, teori peran (*role theory*) didasarkan pada tiga faktor yaitu harapan orang luar, persepsi pemegang peran tentang harapan orang luar itu, dan interpretasi pemegang peran atas perannya sendiri. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, perilaku pemegang peran dapat dijelaskan ataupun diprediksi. Inilah kegunaan utama dari teori peran.

Teori peran memiliki dua poin penting untuk analisis politik. Pertama, teori ini memperlihatkan bahwa aktor politik umumnya berusaha beradaptasi dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dipegangnya. Ini berarti individu bergantung serta bereaksi terhadap konteks sosialnya. Perilaku politik adalah hasil dari upaya aktor politik menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kedua, teori peranan berkemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Teori ini melihat institusi politik sebagai serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan sehingga teori peranan menghubungkan pendekatan

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 45-46.

individualistik dengan pendekatan kelompok. Perilaku individu tetap dibahas sebagai peranan, namun tidak bisa dilepaskan konteks sosialnya.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, Donald Trump adalah aktor politik/pemegang peran yang diteliti. Teori peran akan menjelaskan perilaku politik Donald Trump dalam menjalankan perannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Penulis akan mencoba menganalisa harapan yang ada pada Trump, terutama sumber harapan pertama yang berasal dari orang lain dan dalam hal ini Partai Republik, yang membuatnya mengambil kebijakan untuk melakukan perang dagang dengan China. Hal ini karena keputusan yang dibuat oleh aktor politik sangat dipengaruhi oleh posisinya dalam pemerintahan dan oleh tugas yang berkaitan dengan posisi itu. Sumber harapan kedua yang muncul dari kepribadian Trump sendiri diteliti dari hasil analisa delapan konsep sebelumnya.

### **E. Hipotesis**

Hipotesis bertujuan untuk memaparkan jawaban sementara dari permasalahan dalam penelitian. Penulis berargumen Donald Trump mengambil kebijakan agar AS melakukan perang dagang dengan China karena:

1. Pengaruh karakter nasionalisme (nationalism) yang tinggi, kebutuhan akan kekuatan (need for power) yang tinggi, dan ketidakpercayaan akan orang lain (distrust of others) yang tinggi.
2. Pengaruh latar belakangnya sebagai pebisnis.
3. Pengaruh harapan dari Partai Republik.

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 45.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan alat yang dipakai penulis untuk memperoleh dan menganalisa data dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi pustaka (*library research*). Dengan metode ini penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder dan informasi melalui berbagai bahan bacaan seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen, penelitian lain yang relevan, berita, dan sumber-sumber dari internet yang terkait dengan Karakter Donald Trump dalam Kebijakan Perang Dagang AS-China. Kemudian data yang terkumpul dianalisa secara objektif dan sistematis dengan metode eksplanatif kualitatif dimana data yang didapat diselaraskan antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat menjelaskan suatu fenomena serta bagaimana hubungannya dengan fenomena lain, dalam hal ini penelitian akan berusaha menjelaskan karakter Trump yang mempengaruhi pengambilan kebijakan perang dagang dengan China. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan elaborasi verbal dalam menjelaskan temuan-temuan penelitiannya. Hasil penelitian metode kualitatif dihimpun dari data-data berbagai sumber dan interpretasikan dengan tujuan menemukan makna pada data tersebut.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan level analisa individu dengan unit analisa Donald Trump. Level analisa individu digunakan untuk menganalisa permasalahan perang dagang AS-China karena pengaruh Donald Trump sebagai

---

<sup>36</sup> Gumilar Rusmliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif* dalam Jurnal Socio Humaniora Vol 9 No. 2, 2005, hal 8.



individu sangat besar dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan pola kepemimpinan yang signifikan dari pemerintahan AS yang sebelumnya dibawah Barack Obama dan pada saat periode kepemimpinan Donald Trump. Prioritas Presiden Obama saat menjabat adalah meningkatkan citra global AS dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan luar negeri yang menonjolkan keamanan dan perdamaian untuk mencapainya. Ia berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan sekutu, menawarkan perundingan damai bagi musuh perang dingin AS seperti Kuba, serta banyak melakukan diplomasi *soft power*. Obama menggunakan strategi '*leading from behind*' dan melibatkan pasukannya di Timur Tengah atas dasar kemanusiaan. Untuk bidang ekonomi, ia menandatangani perjanjian perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP) yang merupakan inti dari poros strategis Obama ke Asia.<sup>37</sup>

Pergeseran politik luar negeri AS terjadi saat Trump memasuki Gedung Putih. Ia memperkenalkan kebijakan isolasionis dan proteksionis '*American First*' dan menyatakan bahwa AS bukan penjaga dunia sebagaimana yang digambarkan oleh pemerintahan Obama. Prioritas utama Trump adalah untuk menyelamatkan dan melindungi bangsa AS sendiri dengan tidak terlalu banyak terlibat dalam masalah-masalah global. Ia membuat AS menarik diri dari banyak kesepakatan multilateral termasuk TPP yang tadinya sangat krusial dalam pemerintahan Obama. Trump juga bersikap keras terhadap negara-negara yang dianggapnya merugikan AS, meningkatkan tarif perdagangan, berhenti memberikan bantuan

---

<sup>37</sup> Sadia Fayaz & Nasrullah Khan, *Comparative Analysis of US Presidents' Barack Obama and Donald Trump Foreign Policies* dalam *Global Social Sciences Review* Vol 6 No. 1, 2021, hal 287-297.

militer dan ekonomi ke negara-negara berkembang, serta memperkuat larangan imigrasi ilegal.<sup>38</sup> Dengan perubahan mencolok dalam politik luar negeri AS yang beriringan dengan pergantian presiden ini dapat dilihat bahwa Donald Trump sangat berpengaruh dalam politik luar negeri Amerika Serikat.

### **G. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ditujukan agar penelitian fokus dalam membahas suatu permasalahan dan terhindar dari pembahasan diluar konteks. Dalam penelitian ini, penulis membatasi aktor yang terlibat dalam permasalahan yaitu Donald Trump dan kebijakan luar negeri yang menjadi fokus kajian adalah kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan perang dagang dengan China. Penelitian ini akan mencoba mencari tahu mengapa Donald Trump mengambil kebijakan perang dagang dengan China ditinjau dari karakter pribadinya.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjabarkan bagian-bagian dalam penelitian secara runtut. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari bab I (Pendahuluan), bab II, bab III, bab IV dan bab V (Penutup). Bab I mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan literatur, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan. Bab II berisi Profil Donald Trump yang akan dipecah menjadi dua poin yaitu (a) awal

---

<sup>38</sup> Ibid.

kehidupan Trump dan (b) perjalanan politik Trump. Bab III berisi Perang Dagang Amerika Serikat-China. Bab IV berisi Karakter Donald Trump dalam Kebijakan Perang Dagang dengan China. Bab V berisi kesimpulan.